Jurnal Pharmacia Mandala Waluya Vol.3 No.3
ISSN : 2829-6850
https://jurnal-pharmaconmw.com/jpmw/index.php/jpmw
DOI : https://doi.org/10.54883/jpmw.v3i3.112

Evaluasi Sistem Pengelolaan Obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2021

Andi Mona Fatirah Sari[1], Lodes Hadju[2], Muhammad Isrul[1], [3]Mahfusun Bone
[1]Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya
[2]Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Mandala Waluya
[3]Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Evaluasi sistem pengelolaan obat yang efektif terletak pada kebijakan yang membangun dan mendukung komitmen pemerintah daerah. Pada tahun 2018 terdapat kekurangan sebanyak 149 jenis obat, tahun 2019 sebanyak 132 jenis obat dan pada tahun 2020 sebanyak 107 jenis obat. Selanjutnya ditemukan pula data obat yang telah rusak yaitu pada tahun 2018 sebanyak 40 jenis obat, tahun 2019 sebanyak 25 jenis obat dan tahun 2020 sebanyak 23 jenis obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi sistem pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan data yang diperoleh merupakan data kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 informan. Data diolah dengan menggunakan *content analysis* dan analisis parameter sesuai dengan pedomankementerian Kesehatan RI tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan obat berdasarkan Formularium Nasional (FORNAS) yang dilakukan setiap bulan sesuai standar dengan nilai 78%. Pengadaan obat belum sesuai standar yakni sebesar 62%. Penyimpanan obat yang digunakan adalah menggunakan prinsip FIFO dan FEFO. Pendistribusian obat melayani 14 Puskesmas. Penghapusan obat dilakukan setiap 1 tahun dengan mengumpulkan obat-obat yang rusak dan kadaluarsa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makananan (BPOM) tahun 2019. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk aspek perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan telah sesuai standar sedangkan untuk aspek pengadaan obat belum sesuai standar.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan Obat, Instalasi Farmasi

The Evaluation of Drug Management System at The UPTD Pharmacy Installation of Kolaka District Health Office in 2021

ABSTRACT

Evaluation of an effective drug management system lies in policies that build and support local government commitment. In 2018 there was a shortages of 149 types of drugs, in 2019 there was a 132 types of drugs and in 2020 there was 107 types of drugs. Furthermore, damaged drug data was also found, namely in 2018 as many as 40 types of drugs, in 2019 there were 25 types of drugs and in 2020 it was found 23 types of drugs. This study aims to determine the evaluation of the drug management system at the UPTD Pharmaceutical Installation of the Kolaka Regency Health Office. This research is a descriptive research and the data obtained is qualitative data. The informants in this study were 4 informants. The data were analyzed using content analysis and parameter analysis in accordance with the guidelines of the Indonesian Ministry of Health in 2010. The results of this study indicate that drug planning based on the National Formulary (FORNAS) which is carried out every month is in accordance with the standard with a value of 78%. Drug procurement is not in accordance with the standard, which is 62%. Drug storage used is using the FIFO and FEFO principles. Drug distribution serves 14 health centers. Drug elimination is carried out every 1 year by collecting damaged and expired drugs in accordance with the regulations of the Food and Drug Administration (BPOM) in 2019. The conclusion of this study is that the aspects of planning, storage, distribution, and elimination are in accordance with the standards, while the aspects of drug procurement are not in accordance with the standards.

Keywords: Evaluation, Drug Management, Pharmaceutical Installation

Penulis Korespondensi :
Andi Mona Fatirah Sari
Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Mandala Waluya
E-mail : monafatirah@gmail.com

Info Artikel :
Submitted : 7 September 2023
Revised : 31 Oktober 2023
Accepted : 13 November 2023
Published : 22 Juni 2024

PENDAHULUAN

Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan, yaitu Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter praktek swasta dan lain- lain. Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan kesehatan, maka pengelolaan yang benar, efisien dan efektif sangat diperlukan oleh petugas di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota (Qiyaam *et al*., 2 016).

Pengelolaan obat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah kabupaten/kota. Mulai dari aspek perencanaan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan sistem "*Bottom up*", perhitungan rencana kebutuhan obat, serta mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan obat dari beberapa sumber dana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan melaporkan penggunaan obat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Ibrahim *et al*., 2016).

Instalasi Farmasi merupakan salah satu *revenue center* utama lebih dari 90% pelayanan kesehatan dari perbekalan instalasi farmasi yang meliputi obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, bahan alat kesehatan habis, alat kedokteran, dan gas medik. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, serta penggunaan obat secara rasional. Pengelolaan obat yang efektif terletak pada kebijakan dan kerangka hukum yang membangun dan mendukung komitmen publik. untuk pasokan obat esensial dan dipengaruhi oleh isu-isu ekonomi (Embrey., *et al* 2018).

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen terakhir dari rantai pasokan farmasi. Jika obat-obatan secara konsisten tidak tersedia, maka pasien akan menderita dan anggota staf kehilangan motivasi. Semua orang kehilangan kepercayaan dalam sistem kesehatan, dan kehadiran pasien pun akan menurun. Petugas kefarmasian dapat mempromosikan pelayanan kesehatan yang efektif, membangkitkan rasa percaya di fasilitas kesehatan, dan memberikan kontribusi untuk kepuasan kerja dan harga diri pekerja (Sallet., 2018).

Hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes menyatakan bahwa ketersediaan obat dan vaksin di tahun 2018 berkisar antara 66,7-86,7% di Dinas kesehatan (Dinkes) provinsi, 77 – 83,9% di dinkes kabupaten/kota, 84,1 – 89,5% di rumah sakit, 83,3 – 96,7% di puskesmas rawat jalan dan 82,9 – 90,6% di puskesmas rawat inap. Rentang waktu yang tinggi dan beragam di fasilitas kesehatan primer dan sekunder mengindikasikan perlunya perhatian kepada proses distribusi obat dan vaksin dari gudang farmasi kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan yang dilayaninya (Yuniar., *et al* 2019).

Evaluasi pengelolaan obat yang efektif terletak pada kebijakan dan kerangka hukum yang membangun dan

mendukung komitmen publik untuk pasokan obat esensial dan dipengaruhi oleh isu-isu ekonomi. Tujuan evaluasi pengelolaan obat adalah tersedianya obat esensial dan dapat diakses oleh seluruh penduduk, menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang diproduksi dan pemerataan distribusi, meningkatkan kehadiran obat esensial di fasilitas kesehatan, penggunaan obat rasional oleh masyarakat (Sumriati *et al*., 2022)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka bahwa jumlah tenaga kefarmasian yang ada sampai dengan tahun 2020 berjumlah 30 orang yang tersebar di seluruh puskesmas yang ada di kabupaten Kolaka. Sementara itu untuk pelayanan kafarmasian di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka terdapat 15 orang tenaga kefarmasian beserta staf (Sumriati *et al*., 2022).

Berdasarkan data UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menunjukan bahwa jumlah Obat pada tahun 2018 sebanyak 442 jenis obat, tahun 2019 sebanyak 450 jenis obat dan 2020 sebanyak 368 jenis obat. Namun hal ini masih terdapat pula kekurangan obat yang dirasakan oleh pihak puskesmas. Tahun 2018 terdapat kekurangan 149 jenis obat, Tahun 2019 terdapat kekurangan 132 jenis obat dan tahun 2020 terdapat kekurangan 107 jenis obat. Di sisi lain masih banyak pula didapatkan jenis obat yang rusak. Berdasarkan data tahun 2018 terdapat 40 jenis obat yang rusak, tahun 2019 terdapat 25 jenis obat yang rusak dan tahun 2020 terdapat 23 jenis obat yang rusak (UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2020).

Hasil observasi peneliti di UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa masih terjadi kekurangan beberapa jenis obat di setiap Puskesmas. Hal ini terjadi karena pengadaan jenis obat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengadaan dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan menggunakan anggaran belanja daerah guna memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas Kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil observasi dokumen menunjukan bahwa terjadi perbedaan biaya/anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan anggaran obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu masih terdapat penumpukan obat yang kadaluwarsa di gudang farmasi yang dapat menimbulkan kerugian biaya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa proses pendistribusian UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Farmasi atau Gudang Farmasi Kesehatan (GFK) sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah obat yang diminta ke UPTD Farmasi dengan jumlah obat yang diterima oleh puskesmas. Hal ini dikarenakan di gudang penyimpanan obat UPTD Farmasi sering terjadi kekosongan stok obat sehingga menyebabkan, puskesmas kekurangan obat dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal (Triana *et al*., 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang evaluasi sistem pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah tenaga teknis kefarmasian Instalasi adalah Tenaga Teknis Kefarmasian Instalasi Farmasi dan Puskesmas Kabupaten Kolaka yang berjumlah 43 orang. Pengambilan sampel informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informa kunci penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu Kepala UPTD dan Staf Bidang Kefarmasian Instalasi Farmasi, Ibu hamil dengan usia kehamilan ≥ 1 bulan serta informan pendukung terdiri atas Kepala Puskesmas dan staf bagian Kefarmasian Puskesmas. Pengambilan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yaitu:

1. Kriteria Inklusi : Informan bekerja di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dan bersedia menjadi informan
2. Kriteria Eksklusi : Informan yang tidak bekerja di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dan tidak bersedia menjadi informan.

Instrumen Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan alat bantu : panduan wawancara, *tape recorder*, perekam gambar dan buku catatan.

Analisis Data

Adapun proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Setelah itu, mereduksi data dengan cara membuat rangkuman, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Farmasi dan Puskesmas Kabupaten Kolaka yang berjumlah 43 orang. Informan untuk pencarian tema dan pola data (inti dan proses pernyataan-pernyataan informan). Kemudian, interpretasi data hasil reduksi. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah interpretasi data dengan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Analisis Perencanaan Obat

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa kesesuaian obat yang tersedia di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka bila dibandingkan dengan standar Formularium Nasional (FORNAS) pada tahun 2021 maka hasilnya diatas standar kesesuaian dengan Formularium Nasional (FORNAS) dengan nilai sebesar >76%. Hal ini didukung oleh hasil wawancara perencanaan obat yang dilakukan dan disediakan di UPTD Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yaitu pada setiap obat esensial jenis dan itemnya dapat ditentukan setiap tahun olehkementerianKesehatan dengan merujuk kepada Formularium Nasional (FORNAS).

2. Analisis Pengadaan Obat

Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa kesesuaian ketersediaan anggaran dalam pengadaan dengan kebutuhan masyarakat yaitu sebesar 62%. Hal ini bila dibandingkan dengan standar dana yang dibutuhkan masyarakat pada tahun 2021 masih dibawah standar.

Tabel 1. Kesesuaian Obat dengan Formularium Nasional (FORNAS)

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X= Jumlah obat sesuai FORNAS	330 item	$\frac{x}{y}x100\%$	78%	>76%
Y= jumlah obat yang tersedia di instalasi farmasi Kab. Kolaka	238 item			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Tabel 2. Kesesuaian Ketersediaan Obat dengan Kebutuhan Masyarakat

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X= Jumlah obat yang disediakan pemerintah	Rp.5.000.000.000	$\frac{x}{y}x100\%$	62%	100%
Y =Jumlah obat yang dibutuhkan masyarakat	Rp.8.000.000.000			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Tabel 3. Pengadaan Obat Generik

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X= Nilai obat generikyang tersimpan	Rp.3.119.664.000	$\frac{x}{y}x100\%$	70%	100%
Y = Nilai total obat yangtersedia	Rp.4.472.102.400			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa kesesuaian ketersediaan anggaran dalam pengadaan dengan obat generik sebesar 70%. Hal ini bila dibandingkan dengan nilai total obat yang tersedia pada tahun 2021 masih dibawah standar dengan nilai 100%.

Tabel 4. Ketersediaan Obat

Indikator	Hasil Obervasi	Standar
Tingkat ketersediaan obat	> 12 bulan	12-18 Bulan

Berdasarkan tabel 4 menunjukan bahwa ketersediaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang tersedia melebihi 12 bulan dan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Analisis Penyimpanan Obat

Tabel 5. Kesesuaian Obat dengan Kartu Stok

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X= Jumlah obat pada kartustok	238 Item	$\frac{x}{y}x100\%$	100%	100%
Y = Jumlah seluruh kartu stok	238 Item			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa kesesuaian obat dengan kartu stok bila dibandingkan dengan standarkementerian Kesehatan bahwa kesesuaian obat dengan kartu stok di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sesuai standar 100%.

Tabel 6. Persentase Obat Stok Mati

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X= Jumlah obat mati	2 Item	$\frac{x}{y}x100\%$	1,6%	0%
Y = jumlah seluruh obat	238 Item			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 6 menunjukan bahwa persentase obat stok mati di UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Kolaka tidak sesuai standar dimana hasil persentase obat stok mati 1% bila dibandingkan dengan standarkementerian Kesehatan (2010) bahwa persentase obat stok dengan standar angka 0%.

Tabel 7. Persentase Obat Kadaluarsa

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X= Jumlah obat rusak	12 Item	$\frac{x}{y}x100\%$	5%	<1%
Y = jumlah seluruh obat	238 Item			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa persentase obat kadaluarsa bila dibandingkan dengan Standarkementerian Kesehatan yaitu <1% dimana obat kadaluarsa kartu stok di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka tidak sesuai standar dengan persentase 5%.

Tabel 8. Sistem Penataan Gudang

Indikator	Hasil Obervasi	Standar
FIFO/FEFO	Penyimpanan telah berdasarkan FIFO/FEFO	FIFO/FEFO

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 8 menunjukan bahwa penyimpanan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menggunakan metode FIFO/FEFO.

4. Analisis Pendistribusian Obat

Tabel 9. Ketepatan Distribusi

Indikator	Nilai	Rumus	Hasil	Standar
X = Jumlah PKM yang dilayanisesuai rencana	14	$\frac{x}{y}x100\%$	100%	100%
Y = Jumlah PKM yang dilayani	14			

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 9 menunjukan bahwa ketepatan distribusi obat kepada Puskesmas yang ada di Kabupaten Kolaka bila dibandingkan dengan standarkementerian Kesehatan yaitu distribusi obat yang dilakukan oleh UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sesuai standar.

Tabel 10. Ketepatan Waktu LPLPO

Indikator	Hasil Obervasi	Standar
Ketepatan waktu LPLPO setiap Bulan	14 Puskesmas tepat waktu mengumpulkan LPLPO	100%

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 10 menunjukan bahwa ketepatan waktu Laporan Pemakaian Dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sudah sesuai standar .

Tabel 11. Alat Transportasi Pendistribusian Obat

Indikator	Hasil Obervasi	Standar
Tersedia alat transportasi pendistribusian obat	Memiliki kendaraan operasional khusus distribusi obat	100%

(*Sumber : Data Sekunder, 2022*)

Berdasarkan tabel 11 menunjukan bahwa UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka memiliki kendaraan operasional khusus distribusi obat sudah sesuai standar.

5. Analisis Penghapusan Obat

Tabel 12. Hasil Observasi Penghapusan Obat

Variabel	Indikator	Hasil	Standar	Kesimpulan
Penghapusan	Daftar sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan	Setiap 1 tahun	1 tahun sekali (Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2019	Memenuhi standar
	Berita acara pemusnahan	Dilengkapi dengan berita acara	Pemilik izin edar wajib membuat berita acara pemusnahan (Peraturan BPOM Nomor 14	Memenuhi standar

			Tahun 2019)	
	Metode dan tempat pemusnahan	Metode yang digunakan dengan mengembalikan obat pada pabrik	Berita acara pemusnahan memuat keterangan mengenai tempat/lokasi pemusnahan dan cara pemusnahan (Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2014	Memenuhi standar

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa penghapusan obat telah dilakukan dengan menetapkan daftar sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dan metode serta tempat pemusnahan.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Obat

Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen, dengan adanya perencanaan akan menentukan fungsi manajemen lainnya terutama pengambilan keputusan. Dengan demikian perencanaan merupakan suatu pedoman atau tuntunan terhadap proses kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesesuaian obat yang tersedia di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sebesar 78%. Angka ini bila dibandingkan dengan standar Formularium Nasional (FORNAS) pada tahun 2021 maka hasilnya adalah di atas standar kesesuaian dengan Formularium Nasional (FORNAS) sebesar >76%. Berdasarkan hasil wawancara juga menjelaskan bahwa perencanaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2022 yang sesuai standar karena UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka berpatokan pada laporan pemakaian sisa obat yang bersumber dari Puskesmas yang sesuai dengan pola penyakit dan jumlah penduduk setempat, dan harus berdasarkan Formularium Nasional (FORNAS) yang dilakukan setiap bulan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sumriati *et al*., (2022) yang menemukan bahwa perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara berpatokan pada laporan pemakaian sisa obat yang bersumber dari Puskesmas dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang sesuai dengan pola penyakit dan jumlah penduduk setempat, dan harus berdasarkan DOEN dan Fornas yang dilakukan setiap bulan. Namun, hambatan yang didapatkan dalam perencanaan obat

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yakni terkait dengan jumlah obat yang tidak sesuai dengan permintaan puskesmas dan jenis obat yang telah mendekati masa kadaluarsa (Sumriati *et al*., 2022).

2. Pengadaan Obat

Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan pasokan barang di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut, karena itu pengadaan harus dianggap sebagai fungsi yang strategis dalam manajemen logistik, dimana dalam pelaksanaan pengadaan ini harus tersedia dalam jumlah obat yang cukup, pada waktu yang tepat dan harus diganti dengan cara berkesinambungan dan teratur (Tumangger *et al*., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2022 mempunyai kesesuaian ketersediaan anggaran dalam pengadaan dengan kebutuhan masyarakat sebesar 62%. Hal ini bila dibandingkan dengan standar dana yang dibutuhkan masyarakat pada tahun 2021 masih dibawah standar. Hal ini karena kesesuaian ketersediaan anggaran dalam pengadaan dengan kebutuhan masyarakat bila dibandingkan dengan standar dana yang dibutuhkan masyarakat pada tahun 2021 masih dibawah standar.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang menemukan bahwa bahwa pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara dilakukan melalui metode *e-purchasing* atau secara manual *(offline*) setiap 1 tahun. Pengadaan dilakukan sesuai perjanjian kontrak dengan distributor yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, mempertimbangkan permintaan obat dari Puskesmas untuk menilai kesesuaian obat (Sumriati *et al.*, 2022).

Adapun kendala utamanya terletak pada kurangnya tenaga yang tidak mampu menghitung semua obat yang ada. Realisasi anggaran tahun 2021 mengalami kekurangan sekitar 400 juta. Meskipun anggaran yang tersedia sudah cukup, masalah terletak pada optimalisasi penggunaannya, terutama dalam menghindari kekurangan atau kelebihan stok obat. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang menjelaskan tentang evaluasi pengadaan dan ketersediaan obat di Puskesmas Lau Kabupaten Maros, menyatakan bahwa ketersediaan obat masih belum baik, yang ditunjukkan dari tingkat ketersediaan obat yang belum memenuhi kebutuhan obat pada unit-unit pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit (Fatma *et al*., 2020).

3. Penyimpanan Obat

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Penyimpanan bertujuan agar obat yang tersedia di Unit pelayanan kesehatan terjamin mutu dan keamanannya (Dewi & Yuswantina, 2022).

Penyimpanan obat di Instalasi Farmasi harus menggunakan prinsip FIFO *(First In First Out)* yaitu obat yang datang lebih awal harus dikeluarkan lebih dahulu. FEFO *(First Expired First Out),* yang berarti obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan lebih dahulu. Obat sediaan disusun berdasarkan abjad (alfabetis) atau nomor. Obat rusak atau kadaluarsa dipisahkan dari obat lain yang masih baik dan disimpan di luar gudang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian obat dengan kartu stok dan persentase obat kadaluarsa di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sesuai standar. Sementara itu penyimpanan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menggunakan metode FIFO/FEFO. Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis penyimpanan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menjelaskan bahwa prinsip penyusunan obat yang digunakan selama ini adalah menggunakan prinsip FIFO dan FEFO, bentuk sediaan di susun berdasarkan alfabetis, tetapi tidak terapkan untuk semua jenis obat-obatan. Obat yang rusak dan kadaluarsa sudah di pisah. Dalam hal penyimpanan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka maupun di Puskesmas di dukung dengan fasilitas yang memadai dalam mnjaga mutu dan keamanan obat.

4. Pendistribusian Obat

Cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Prinsip-prinsip cara distriubsi obat yang baik berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat dan/atau bahan obat dalam rantai distribusi (Saputera., *et al* 2022).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan distribusi obat kepada Puskesmas yang ada di Kabupaten Kolaka bila dibandingkan dengan Standar karena UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka selalu melayani 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kolaka tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan waktu Laporan Pemakaian Dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sudah sesuai standar. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan operasional khusus distribusi obat sudah sesuai standar.

Berdasarkan informasi dari para informan diketahui bahwa kegiatan dapat dilakukan jika kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka memberikan persetujuan pendistribusian sesuai dengan rencana kebutuhan obat di Puskesmas. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menemukan bahwa kegiatan distribusi obat dapat dilakukan jika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara memberikan persetujuan pendistribusian sesuai dengan rencana kebutuhan obat di Puskesmas (Sumriati et al., 2022).

5. Penghapusan Obat

Penghapusan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak Puskesmas

dalam menindak lanjuti kerusakan obat dengan cara mengirim berita acara obat yang rusak/kadaluarsa ke Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi Kota (GFK) untuk ditangani selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurlaela *et al.*, 2022)

Menurut Permenkes No. 75 Tentang Standar Pelayanan Farmasi bahwa administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak terpakai karena kadaluwarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa hasil observasi penghapusan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka telah dilakukan dengan menetapkan daftar sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dan metode serta tempat pemusnahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 (2019) yang menyebutkan bahwa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditarik dari peredaran atau yang masih dalam persediaan Pemilik Izin Edar wajib dilakukan pemusnahan.

Dalam hal pemusnahan obat dilaksanakan terhadap kemasan, pada label dan tidak mempengaruhi mutu Obat. Pemusnahan obat dilakukan oleh Pemilik Izin Edar. Pemilik Izin Edar wajib membuat Berita Acara Pemusnahan terkait dengan kegiatan. Berita acara pemusnahan memuat keterangan mengenai hari, tanggal, dan tempat/lokasi pemusnahan, pihak yang memusnahkan/Pemilik Izin Edar, saksi Petugas, nama obat, bentuk sediaan, nomor izin edar, jumlah obat, cara pemusnahan dan nama dan tanda tangan pihak yang memusnahkan beserta saksi- saksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa untuk aspek perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan telah sesuai standar sedangkan untuk aspek pengadaan obat masih belum sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, V. C., & Yuswantina, R. (2022). Evaluasi Penyimpanan Obat di Gudang Farmasi Puskesmas Mangunsari Kota Salatiga. Journal of Holistics and Health Science, 4(1), 138–145. https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i1.137

Embrey, M., 2018. Management Sciences for Health. MDS-3: Managing Access to Medicines and Health Technologies, Arlington, VA: Management Science for Health Drug Supply, Kumarian Press.

Fatma, Rusli, & Wahyuni, D. F. (2020). Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Lau Kabupaten Maros. Jurnal Farmasi, 8(2), 9–14.

Ibrahim, A., Lolo, W. A., & Citraningtyas, G. (2016). Evaluasi Penyimpanan Dan Pendistribusian Obat Di Gudang Farmasi Psup Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. Pharmacon, 5(2), 166–174.

Nurlaela, Syarifuddin Yusuf, & Usman. (2022). Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kabere Kabupaten

Enrekang. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan, 5(2), 152–160. https://doi.org/10.31850/makes.v6i2.774

Qiyaam, N., Furqoni, N., & Hariati. (2016). Evaluasi Manejemen Penyimpanan Obat di Gudang Obat Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Soejono Selong Lombok Timur. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 1(1), 61–70.

Sallet, JP., 2018. Management Sciences for Health. MDS-3: Managing Access to Medicines and Health Technologies, Arlington, VA: Management Science for Health Drug Supply, Kumarian Press.

Saputera. (2022). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Di Upt Intalasi Farmasi Kabupaten Banjarmasin. Jurnal Insan Farmasi Indonesia, 5(8.5.2017), 2003–2005. https://doi.org/10.36387/jifi.v5i1.EVALUASI.

Sumriati, Sety, L. O. M., & Sudayasa, I. P. (2022). Manajemen Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. Jurnal Ilmiah Obsgin, 14(4), 2–16. Manajemen Kesehatan Indonesia, 02(01). Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 02(01).

Triana, M., Suryawati, C., & Sriyatmi, A. (2014). Evaluasi Perencanaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) di Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 02(01).

Tumangger, H. B., Pramudho, K., Noviansyah, & Adyas, A. (2021). Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan, 15(3), 314–326. https://doi.org/10.33860/jik.v15i3.507

Yuniar Y, et al. 2019. Laporan Akhir Penelitian Distribusi, Ketersediaan Serta Pelayanan Obat Dan Vaksin Dalam Menghadapi Jaminan Kesehatan Semesta 2019 Jakarta Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes.

Jurnal Pharmacia Mandala Waluya (JPMW) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.